

POLEMIK PEMERINTAHAN DESA DINAS BONGKASA PERTIWI DALAM PENGEMBANGAN STRATEGI DESA WISATA DIMASA PANDEMI COVID-19

Ni Komang Tri Wulandari¹⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari²⁾, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : komingwulandari21@gmail.com ¹⁾, putriwirantari@unud.ac.id ²⁾, wiwin.fisip@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Bongkasa Pertiwi Village is one of the tourist villages established by the Badung Regency government based on Badung Regent Regulation Number 47 of 2010. With the outbreak of the Covid-19 Pandemic, many polemics have arisen in carrying out the strategies that have been designed due to the decline in tourist visits. Analysis using SWOT analysis and SWOT matrix. The results of this study indicate that there are still several obstacles such as the tourism village development strategy through the DED concept that cannot be realized due to the Covid-19, the role of traditional villages and service villages in the development of sustainable tourism villages has not been maximized, tourism has not been able to contribute to PADes. Implementation of program strategies that have not been optimal due to the outbreak of the covid-19 pandemic, low human resources, minimal policies in regulating the management of tourist villages.

Keyword : *tourist village, strategic management, SWOT analysis*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional melalui pembangunan pariwisata menjadi sektor industri yang menjanjikan. Sektor pariwisata dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Peran industri pariwisata juga dapat dijadikan sarana pengembangan daerah Kabupaten/Kota seperti halnya daerah yang menjadi tujuan wisata mancanegara yaitu Provinsi Bali. Berkembangnya pariwisata Bali tidak luput dari peran desa-desa yang menjadi bagian kepariwisataan Bali seperti adanya desa

wisata. Kabupaten Badung sebagai wilayah di provinsi Bali yang mengoptimalkan desanya menjadi desa wisata. Kabupaten Badung di dalam pengembangan desa wisata mengeluarkan peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan beberapa desa wisata salah satunya Desa Wisata Bongkasa Pertiwi. Sejak ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2010 Desa Bongkasa

Pertiwi terus berupaya mengembangkan desa wisata agar keberadaan desa wisata semakin dapat berkembang.

Adanya pembangunan desa wisata yang belum maksimal sejak ditetapkan pada tahun 2010 mengakibatkan banyak potensi desa belum dapat dikembangkan. Seperti ditemukan bahwa pokdarwis tidak mampu berkontribusi secara aktif akibat kurangnya partisipasi dari masyarakat yang berkompeten di bidang pariwisata. Desa Bongkasa Pertiwi sejak ditetapkan sebagai desa wisata sangat didominasi dengan wisata rafting yang bersumber dari para investor yang menjadi tujuan favorit wisatawan. Kurangnya peran dan sinergi antara desa adat dan desa dinas dalam penentuan arah kebijakan manajemen desa wisata sehingga menimbulkan banyak polemik dalam pengembangan desa wisata.

Pentingnya Proses perancangan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga adapun strategi yang telah dirancang sejak awal 2010 sampai 2019 ada beberapa strategi sudah diimplementasikan diantaranya Desa Wisata Bongkasa Pertiwi telah mengembangkan desa wisata berbasis ekonomi berkelanjutan, Selain itu strategi yang sudah dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan kampung mandiri agar dapat mengembangkan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat dalam proses pengembangan potensi desa, selanjutnya Desa Bongkasa Pertiwi merancang *Detail Engineering Design (DED)* untuk

pembangunan desa wisata. Adanya Pandemi COVID-19 tentunya dalam proses pengembangan desa wisata melalui strategi pembangunan desa wisata yang telah dirancang tidak dapat terlaksana dengan baik. Adapun polemik yang dihadapi pemerintah Desa Dinas Bongkasa Pertiwi dalam tahap pengembangan desa wisata dimasa pandemi Covid-19 seperti Pembangunan desa wisata melalui perencanaan DED terhambat akibat dana dari pemerintah Kabupaten Badung di fokuskan ke penanganan pandemi, Belum adanya pemungutan pajak melalui tempat wisata di Bongkasa Pertiwi yang masuk ke dalam PADes sangat terpengaruh di masa pandemi, Pengembangan desa wisata dimasa pandemi terfokus kepada pemberdayaan masyarakat, serta Kurangnya Peran Desa Adat dalam pengelolaan desa wisata.

Mewabahnya virus Covid-19 tentunya pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi perlu merancang strategi dalam mengembangkan desa wisata ditengah pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kembali produktivitas masyarakat yang terdampak dari segi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian berjudul **“Polemik Pemerintahan Desa Dinas Bongkasa Pertiwi Dalam Pengembangan Strategi Desa Wisata Dimasa Pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)*”**

2. KAJIAN PUSTAKA

Setiap organisasi tentunya memiliki cara yang berbeda dalam merumuskan dan mengarahkan kegiatan dalam manajemen strategi. Untuk melakukan perumusan strategi diperlukan adanya model manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2012) terdapat 4 indikator yaitu :

a. Analisis Lingkungan

Pengamatan tentang kondisi eksternal maupun internal didalam sebuah masalah yang ingin diamati atau masalah yang ingin diselesaikan. Dimana dalam lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan .Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. yang telah direncanakan sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut maka perlu adanya matriks SWOT yang dapat memberikan gambaran bagaimana peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal dan

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan diatas penulis perlu menganalisis kembali terkait tentang polemik pemerintahan Desa Dinas Bongkasa Pertiwi dalam strategi pengembangan Desa Wisata di masa pandemi Covid-19. Dalam hal

internal dapat dipadukan dengan kekuatan dan kelemahan dari perusahaan atau organisasi.

b. Formulasi strategi

Proses penyusunan rencana jangka Panjang untuk dapat melihat kesempatan dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mewujudkan manajemen yang efektif. Hal tersebut dapat dilihat melalui misi, tujuan, strategi, dan kebijakan.

c. Implementasi strategi

Bentuk pelaksanaan strategi yang telah di rancang yang dapat diwujudkan melalui adanya pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

d. Evaluasi dan pengendalian

Proses yang dilalui dalam aktivitas-aktivitas perusahaan, yang merupakan bentuk dari hasil kerja yang di awasi dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan

digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, atau verifikasi. Penyajian data dalam

ini penulis berupaya menguraikan analisis tersebut ke dalam indikator manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2012) sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan

Pemerintah desa dinas Bongkasa Pertiwi melaksanakan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Untuk analisis eksternal yang dilaksanakan yaitu meliputi analisis peluang dan ancaman. Terkait dengan peluang dari pengembangan desa wisata dimasa pandemi Covid-19 ini adanya pengembangan wisata edukasi melalui pengembangan kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat serta mengoptimalkan peluang yang dimiliki melalui sumber daya alam yang dimiliki. Sedangkan yang menjadi suatu ancaman adalah adanya kondisi pandemi menyebabkan turunya kunjungan wisatawan berdampak kepada perekonomian. Ancaman lainnya yang muncul dengan berkembangnya pariwisata desa bisa terjadinya perang harga dalam proses pemasaran produk UMKM. Kekuatan terbesar dari desa wisata Bongkasa Pertiwi berada pada sumber daya alam yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dengan adanya aliran sungai ayung, pertanian, peternakan menjadi destinasi menarik baik sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Kekuatan dari potensi yang ada terus bisa dioptimalkan dengan inovasi-inovasi dalam menggali kreativitas untuk pengembangan desa wisata yang lebih maju. Sedangkan terkait kelemahan yang dirasakan dalam pengembangan desa wisata di masa pandemi covid-19 masih kurangnya pendapatan asli desa karena belum adanya PADes dari pariwisata yang bisa berkontribusi ke desa. Selain itu dari sisi pemerintahan desa masih terjadi

permasalahan dana untuk mengoptimalkan pembangunan pariwisata yang sudah dirancang.

b. Formulasi Strategi

Pemerintahan Desa Dinas dalam pengembangan Strategi Desa Wisata Bongkasa Pertiwi telah memformulasikan visi, misi, tujuan, strategi serta kebijakan sebagai bentuk pengembangan formulasi strategi jangka panjang. Dalam hal ini visi misi serta tujuan dari Desa Wisata Bongkasa Pertiwi menjadi acuan dalam pengembangan Desa Wisata di Bongkasa Pertiwi. Terkait dengan strategi, pengembangan desa wisata dimasa pandemi Covid-19 telah melaksanakan tiga strategi ,pertama adanya strategi pengembangan desa yang berkelanjutan secara ekonomi, kedua strategi pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat, ketiga pengembangan desa wisata dengan penataan ruang fisik desa serta membangun wisata baru yang telah tertuang dalam master plan detail engineering design. Namun dari ketiga strategi yang telah dirancang baik sebelum adanya pandemi sampai saat adanya pandemi belum bisa berjalan maksimal sehingga saat ini akan mulai dioptimalkan. Sedangkan terkait dengan kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata belum banyak kebijakan yang dirancang oleh pemerintah desa akibat dalam pengelolaan desa wisata masih minim peran desa adat yang memiliki wewenang penuh terhadap pengembangan desa wisata itu sendiri. Namun dimasa

pandemi ini kebijakan terkait sertifikat CHSE yang wajib dimiliki tempat wisata.

c. Implementasi Strategi

Pemerintahan desa dinas Bongkasa Pertiwi dalam pengembangan desa wisata di masa Covid-19 dalam mengimplementasikan strategi yang dilakukan untuk pengembangan desa wisata melalui pengoptimalan kampung mandiri yang sudah dirancang sejak 2018 masih belum maksimal. Dimasa pandemi saat ini program kampung mandiri salah satunya pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang akan di maksimalkan dengan menciptakan inovasi produk yang bisa dijual di Desa Wisata serta menciptakan karya seni baru sebagai icon desa wisata di Bongkasa Pertiwi. Namun dengan mewabahnya pandemi banyak program yang tidak bisa berjalan, dikarenakan adanya faktor anggaran yang minim. Pemerintah desa dinas masih terkendala dengan belum adanya PADes yang bisa dimaksimalkan dimasa pandemi untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Dalam melaksanakan program kerja serta pengelolaan desa wisata diperlukan SOP. Namun masih terdapat kelemahan dari pengelolaan lembaga di desa Bongkasa

Pertiwi dikarenakan tidak adanya SOP yang jelas serta masih adanya pembagian tugas ganda di pemerintahan desa dan lembaga pokdarwis.

d. Evaluasi dan Pengendalian Strategi

Pemerintahan desa dinas dalam pengembangan strategi desa wisata di Bongkasa Pertiwi belum maksimal dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian. Bentuk evaluasi yang dilakukan pemerintah desa dinas hanya pada masalah kedinasan, selanjutnya evaluasi lembaga pokdarwis tidak berjalan efektif karena kurangnya partisipasi anggota yang aktif, masih banyak anggota yang merangkap jabatan. Selain itu untuk lembaga BUMDes melakukan evaluasi terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat hanya terkait penentuan harga, dan proses pemasaran. Bentuk pengendalian yang dilakukan desa hanya bentuk pengawasan dalam memberikan pelatihan dan memberikan fasilitas untuk mengikuti event yang ada di pemerintahan desa. Kurangnya sumber daya manusia di desa menjadi kendala. Banyak pengelolaan desa wisata dibawah naungan swasta yang menjadi kendala pemerintah dalam melakukan pengawasan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa dinas Bongkasa pertiwi telah melaksanakan Analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman.

Dalam hal ini analisis eksternal belum dilaksanakan secara maksimal dilihat dari belum mampunya pemerintah desa mengatasi ancaman terkait persaingan di dalam pengembangan desa wisata dan belum maksimalnya pengembangan sektor UMKM. Terkait analisis internal

- yang dilaksanakan belum mampu dianalisis secara menyeluruh oleh pemerintah desa.
- b. Keterkaitan dengan indikator formulasi strategi yaitu pemerintah desa Bongkasa Pertiwi dalam pengembangan strategi desa wisata dimasa pandemi masih kurang optimal. Dalam hal ini visi misi tujuan desa wisata yang dijadikan acuan dalam pengembangan desa wisata. Terkait dengan strategi, pemerintah desa Bongkasa Pertiwi telah melaksanakan dua strategi yaitu ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan satu strategi yang belum dapat di jalankan terkait rancangan pembangunan desa wisata melalui konsep *detail engineering design*. Namun dari kedua strategi yang telah dijalankan masih terdapat banyak kendala yaitu pada kurang SDM, kurangnya anggaran akibat pandemi Covid-19. Sedangkan terkait kebijakan pemerintah desa belum mampu memberikan kebijakan yang maksimal untuk pengelolaan desa wisata.
- c. Pemerintah desa dinas Bongkasa Pertiwi dalam mengimplementasikan strategi yang dilakukan untuk pengembangan desa wisata di Bongkasa Pertiwi melalui program kampung mandiri serta penataan desa wisata melalui pembangunan desa dengan master *plan detail engineering design*. Dari kedua program tersebut masih belum bisa berjalan secara maksimal dan tidak bisa terealisasi akibat adanya pandemi Covid-19. Sedangkan terkait anggaran pemerintah desa dinas belum mampu mandiri dan belum maksimal dalam membantu pengembangan sektor wisata dan usaha di Bongkasa Pertiwi. Terkait prosedur, SDM yang belum berkompeten dalam lembaga pokdarwis, serta masih ada beban kerja ganda.
- d. Pemerintah desa dinas Bongkasa Pertiwi telah melaksanakan evaluasi kerja dalam pengelolaan desa wisata belum maksimal dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian. Bentuk evaluasi yang dilakukan pemerintah desa dinas hanya pada masalah kedinasan, selanjutnya evaluasi lembaga pokdarwis tidak berjalan efektif karena kurangnya partisipasi anggota yang aktif, masih banyak anggota yang merangkap jabatan. Selain itu untuk lembaga BUMDes melakukan evaluasi terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat hanya terkait penentuan harga, dan proses pemasaran. Bentuk pengendalian yang dilakukan desa hanya bentuk pengawasan dalam memberikan pelatihan dan memberikan fasilitas untuk mengikuti event yang ada di pemerintahan desa.
- e. Hasil analisis Matriks SWOT pemerintahan desa dinas Bongkasa Pertiwi dalam pengembangan strategi desa wisata dimasa pandemi mendapatkan 4 prioritas alternatif strategi yaitu strategi SO (*strength-opportunities*), WO (*Weakness-opportunity*), ST (*Strength-threat*), WT (*Weakness-Threat*).

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antara, M., & Arida, S. (2015). Panduan pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal. Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana, 23.

David, Fread R. 2006. Manajemen Strategi. Jakarta : Salemba Empat

Fandeli, Chafid. 2002. Perencanaan Kepariwisata Alam. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta.

Jurnal dan Karya Tulis Sejenisnya

Osin, R. F., Kusuma, I. R. W., & Suryawati, D. A. (2019). Strategi Pengembangan Objek Wisata Kampung Tradisional Bena Kabupaten Ngada-Flores Nusa Tenggara Timur (NTT). *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 14(1) . Pada 14 Desember 2021

Wismayanti, K. W. D., & Purnamaningsih, P. E. (2020). strategi Pengembangan Pariwisata Spiritual di Kabupaten Gianyar. *Media Bina Ilmiah*, 15(3), 4209-4218.

Sanjaya, R. B. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. *JUMPA*, 5(1), 91-110.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa